



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan : Budi Utomo Nomor : 10 Telp/Fax (0352) 481931

**P O N O R O G O**

**SURAT KETERANGAN**

*460/807/405.10/2016.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. M. Daroini, M.Pd.I  
Pekerjaan : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial

dengan ini menerangkan bahwa ;

N a m a : Johan Arifin  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Pemerintahan  
Semester : VIII ( Delapan )

Adalah benar-benar telah melaksanakan wawancara di instansi kami guna melengkapi data praktikum persyaratan penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Februari 2016

An. KEPALA DINAS SOSNAKERTRANS  
KABUPATEN PONOROGO  
Kabid Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial



Drs. M. Daroini, S.Pd.I

Pembina Tingkat I

NIP : 19581210 198603 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SUKOREJO  
**DESA KEDUNGBANTENG**

Jalan Raya Ponorogo – Magetan Nomor 111

Email : [desa\\_kedungbanteng@yahoo.com](mailto:desa_kedungbanteng@yahoo.com)

PONOROGO

Kode Pos. 63453

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474.2/125/405.30.6/12 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menerangkan dengan sebenarnya bahawa :

1. N a m a : JOHAN ARIFIN
2. Tempat/Tgl.Lahir : Muara Teweh, 18 Agustus 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. N I M : 12221087
5. A l a m a t : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
6. Keterangan : Bahwa orang tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Lokalisasi Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo pada tanggal 20 Januari 2016 s/d 27 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kedungbanteng, 23 – 08 – 2016

Kepala Desa Kedungbanteng,



## ISI WAWANCARA

Wawancara Dengan Nama/kode : Bapak Sudiono / K.S

Tgl/bulan : 18 Januari dan 24 Maret 2016

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

1. Sebelum masuk ke inti pembahasan, apakah ada tindakan dari DINSOSNAKERTRANS Ponorogo sendiri untuk menanggulangi masalah prostitusi ini sebelum adanya Instruksi penutupan ini?

K.S :

**Ada, sebenarnya dulu Lokalisasi yang bertempat di Desa Kedung Banteng hendak di jadikan sebagai industri kerupuk, namun hal itu tidak terlaksana karena kondisi sosialnya yang kurang mendukung.**

2. Bagaimana isi daripada instruksi Gubernur Jatim? apa saja point-pointnya?

K.S :

- Instruksi Gubernur Nomor : 460/16474/031/2010 yang berisi Perihal Penanganan dan Penanggulangan Prostitusi serta Woman Trafficking, kemudian Instruksi Nomor 460/15612/031/2011 yang berisi Perihal Penanganan Lokalisasi WTS di Jawa Timur.
- **Kandungan point-point pentingnya yaitu:**
  - I. Segera melakukan penutupan tanpa adanya relokasi Lokalisasi WTS dan berbagai tempat yang dianggap sebagai tempat prostitusi terselubung dengan bekerja sama dengan pihak terkait warga masyarakat.**
  - II. Melakukan perubahan nilai, sikap dan perilaku bagi para WTS dan Eks WTS dengan pembinaan mental spiritual, dan pembekalan dengan pelatihan keterampilan yang mapan.**
  - III. Untuk mendukung pelaksanaan penanganan dan pasca penutupan Lokalisasi WTS dengan memunculkan solusi sehingga mendapat kepastan hukum bagi para terdampak dari agenda penutupan ini.**

3. Bagaimana Dinas menjalankan tugas dan fungsinya untuk menerapkan instruksi Gubernur Jatim tersebut? Bagaimanakah proses berjalannya penutupan itu?

K.S :

- **Kita dari Dinas melaksanakan agenda ini dengan tahapan-tahapan diantaranya Tahap Identifikasi Data, Tahap Sosialisasi dan Koordinasi dan Tahap Pemberdayaan, Tahap Deklarasi Pemulangan, Tahap Penggosongan, dan Tahap Monitoring dan Evaluasi.**

- **Alhamdulillah proses penutupan dilaksanakan dengan tertib tanpa ada konflik dari mereka yang terdampak, semuanya sudah menerima dengan lapang dada.**
4. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat proses penutupan? Dan bagaimana DINSOSNAKERTRANS menghadapi kendala tersebut?
- K.S :
- Tidak ada kendala yang berarti selama proses penutupan.**
5. P: Bagaimana tindak lanjut DINSOSNAKERTRANS pasca penutupan lokalisasi ini ?
- K.S :
- Untuk sementara belum adanya rencana kerja dan masih menunggu Instruksi dari atasan mengenai hal ini, tetapi kita bersama pihak yang terkait melakukan monitoring terus, salah satunya yang tertuang dalam forum MUSPIKA.**
6. Bagaimana DINSOSNAKERTRANS memantau keadaan pasca penutupan ditempat lokalisasi?
- K.S :
- Dinas membuat tim Khusus monitoring karena ini merupakan bagian daripada tahapan penutupan dan disamping itu dengan melalui forum MUSPIKA tadi.**
7. Bagaimana dampak dari agenda penutupan ini dari segi ekonomi dan sosialnya? Bagaimana bantuan dari PEMPROV JATIM dengan agenda ini?
- K.S :
- **Memang secara umum, kondisi ekonominya menurun dikarenakan ini merupakan salah satu mata pencahariannya, makanya hal ini diantisipasi dengan pembekalan keterampilan sebelum penutupan.**
  - **Kemudian pemantauan dari sektor lain seperti perilaku mereka yang terlibat setelah penutupan, mereka menyadari atau punya tingkat kesadaran akan pelanggaran UU tentang hal ini dan pelanggaran akan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Sedangkan dari sektor agama, masih kurangnya atau rendahnya pemahaman akan agama, sehingga kondisi religiusnya masih sama dengan sebelum penutupan.**
  - **Menyangkut kekhawatiran tingkat prostitusi ilegal yang semakin meningkat dan menjamur di mana-mana, hal ini sudah di luar dari agenda karena Dinas hanya sebatas pelaksana Instruksi dari Gubernur Jatim dan masih belum adanya kebijakan lanjut dari pemerintah daerah mengenai ini. Untuk hal ini nantinya sudah menjadi kewenangan dari SATPOL PP dan pihak kepolisian setempat.**
  - **Untuk bantuan dari PEMPROV JATIM sudah sampai kepada mereka yang terkena dampak.**
8. Sejauh Monitoring yang telah dinas lakukan, apakah ada dari mereka yang kembali melakukan transaksi Prostitusi ini?

K.S :

**Sejauh ini kami belum menemukan mereka kembali melakukan prostitusi.**

9. Untuk PSK yang datang dari luar ponorogo, Bagaimana nasib mereka?

K.S :

**Untuk yang dari luar Ponorogo kita berikan dan merupakan tanggung jawab Dinas di masing-masing daerah.**

Wawancara Dengan Nama/kode : Bapak Sudiono / K.S

Tgl/bulan : 27 Mei 2016

1. Terkait tindak lanjut pelaksanaan penutupan dan pembongkaran kemarin, bagaimana dan sejauh apa program dan pelaksanaan poin-poin yang harus dilaksanakan daripada Instruksi Gubernur Jatim?

KS :

a. Dalam hal ini, DINSOSNAKERTRANS Ponorogo menutup Lokalisasi Kedung Banteng dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dengan menyediakan fasilitator seperti Departemen Agama dalam pembekalan mental dan spiritual agama, kemudian Dinas INDAGKOP dalam hal pembekalan kemandirian usaha. Di samping itu bekerja sama juga dalam hal keamanan dengan pihak Kapolsek Sukorejo baik itu pada saat proses penutupan ataupun pasca penutupan.

b. Sedangkan terkait dengan pembongkaran 11 April kemarin, sebelum jauh-jauh hari pembongkaran dinas sosial mendapat isu bahwa kepala Desa setempat menyanggupi untuk membongkar sendiri bangunan Lokalisasi tersebut di akhir tahun ini sambil menunggu warganya mencari tempat tinggal lagi yang baru, tetapi kepala Desa lupa bahwa jabatan di atas kepala Desa masih ada dan bisa kapan saja membongkar bangunan tersebut. Dan pada akhirnya disebabkan karena ada indikasi-indikasi masih berjalannya prostitusi dan mereka warga eks Lokalisasi tidak mau menerima program pemberdayaan ekonomi yang dicanangkan oleh DINSOSNAKERTRANS, sehingga bapak Bupati Ponorogo dengan cepat mengeluarkan surat perintah untuk membongkar Lokalisasi ini.

Maka dinas sosial bekerja sama dengan dinas terkait melakukan pembongkaran sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan dengan membongkar semua bangunan Lokalisasi tanpa ada yang tersisa termasuk bangunan sekitar yang berada di luar kompleks Lokalisasi, karena bangunan ini kategori bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik desa setempat, disamping itu

pembongkaran tidak ada dana kompensasi karena sebelumnya mereka sudah menerima dana tersebut.

Mengenai tempat tinggal mereka yang dibongkar, dinas sudah menawarkan bagi mereka yang tidak punya tempat rumah untuk tinggal di panti asuhan Jiwo Waluyo, di sana nantinya akan dibina dan dilatih, tetapi warga eks Lokalisasi tidak ada yang mau tinggal di sana, mereka menginginkan hidup sebebas-bebasnya, sehingga sehabis pembongkaran tidak diketahui nasib mereka dan apabila mereka masih melakukan kegiatan prostitusi liar atau ilegal, maka ini sudah bukan lagi ranah dinas sosial, melainkan ini sudah menjadi ranah ketertiban dan keamanan, tapi akan tetap dibina oleh dinas sosial apabila mereka kedapatan melakukan kegiatan prostitusi lagi, karena ini merupakan program kerja sub bidang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Penutupan dan pembongkaran bangunan yang ada di Lokalisasi bukanlah menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru yang dampaknya seperti akan menjamurnya prostitusi liar di mana-mana, tapi ini merupakan resiko sistem atau kebijakan dan di setiap kebijakan pasti ada yang di korbankan. Selanjutnya Lahan eks Lokalisasi ini rencananya akan dibangun PUKESMAS Pembantu dan dalam jangka panjang akan dibangun sekolah Farmasi tapi ini masih dalam kategori rencana.

2. Seirama dengan hal di atas, merinci kepada kebijakan yang telah di buat kemarin, bagaimana DINSOSNAKERTRANS dalam perumusan kebijakannya, perencanaan daripada perumusan kebijakan tersebut, penyusunan programnya, penganggaran, implementasi kebijakannya, evaluasi kinerja daripada kebijakan tersebut dan serta bagaimana umpan balik(feedback) dari lingkungan baik dari masyarakat yang terkena kebijakan ataupun masyarakat pada umumnya sebagai pelaporan kinerja (akuntabilitas) kepada masyarakat?

KS :

- I. Perumusan seluruh kebijakan terkait akan hal ini semuanya dirumuskan oleh pemerintah daerah sedangkan dinas hanya pelaksana kebijakan
- II. Sedangkan untuk perencanaan kebijakan dinas sosial membentuk dinas sosial membentuk formasi panitia khusus penutupan Lokalisasi melalui SK Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/420/405.10/2015 yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2015. Kemudian dinas juga membentuk panitia pelaksana kegiatan pasca penutupan Lokalisasi Kedung Banteng pada kegiatan pemantauan kemajuan perubahan mental eks penyandang penyakit sosial di Kabupaten Ponorogo ini, melalui SK Bupati Ponorogo Nomor :

188.45/2213/405.10/2015. Selanjutnya agar warga Lokalisasi yang terkena dampak khususnya warga Ponorogo sendiri mendapat jaminan bantuan dan kepastian hukum, dinas juga menetapkan nama-nama Mucikari dan besarnya pemberian bantuan modal usaha sebagai dampak penutupan Lokalisasi Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo pada kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap menyal eks penyandang penyakit sosial di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2015 melalui SK Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1661/405.10/2015. Sedangkan untuk keseluruhan bantuan yang telah diberikan bersumber dari dana anggaran APBD dan APBN

- III. Untuk penyusunan program kebijakan, dinas telah menyusun tahapan-tahapan yang di mulai dari tahapan identifikasi data, tahapan sosialisasi dan koordinasi, tahap pemberdayaan, tahap deklarasi pemulangan, dan tahap pengosongan
- IV. Untuk penganggaran berasal dari APBD Kabupaten Ponorogo
- V. implementasi kebijakan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala di mulai dari pembekalan mental spiritual dan pelatihan keterampilan sampai pada deklarasi penutupan.
- VI. Evaluasinya dari dinas sendiri menyadari bahwa dinas kurang memberikan kesadaran kepada warga eks Lokalisasi
- VII. Feed backnya banyak warga ponorogo menyetujui kebijakan ini tetapi ada juga mereka yang kurang setuju dengan kebijakan ini khususnya warga eks Lokalisasi dengan alasan Lokalisasi merupakan tempat mereka mencari nafkah.

Wawancara Dengan Nama/kode : Bapak Saman / K.D

Tgl/bulan : 20 Januari 2016

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

1. Apakah Desa setuju dengan penutupan lokalisasi ini?

K.D :

**Kurang begitu setuju dengan agenda penutupan ini, karena dampak ekonomi khususnya yang sangat berpengaruh yaitu pendapatan bagi mereka kerja disitu menjadi hilang dan pendapatan desa menjadi berkurang bahkan tidak ada.**

2. Bagaimana proses penutupan berjalan? Apakah Desa dilibatkan dalam proses penutupan?

K.D :

- **Selama proses penutupan tidak ada yang bergejolak dan semua pasrah saja, jadi berjalan dengan lancar**

- **Desa pada waktu penutupan tidak dilibatkan, padahal Desa disini juga berperan dalam mengalokasikan tanah Desa untuk lahan Lokalisasi ini.**
3. Apakah Desa merasa dirugikan dengan adanya agenda ini khususnya dari segi ekonomi dan sosial?

K.D :

**Yang sangat terasa ruginya dari segi ekonominya, karena pendapatan warga kami yang bekerja terkait ini menjadi hilang dan pendapatan kas Desa yang juga hilang, selain itu sedangkan dari segi sosial biasa saja.**

4. Apa langkah Desa dalam membantu warganya yang terkena dampak dari agenda ini? Apa saja program yang dijalankan oleh Desa untuk itu?

K.D :

- **Desa membebaskan bayar sewa tanah yang digunakan untuk lahan Lokalisasi kemarin bagi mereka yang masih tinggal disitu.**
- **Untuk saat ini masih menunggu perintah dari PEMDA dan belum ada program kerja untuk itu, hanya melakukan pembebasan bayar sewa tanah dalam rangka membantu warganya.**

Wawancara Dengan Nama/kode : Bapak Sunaryo / K.N

Tgl/bulan : 13 April 2016

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

- 1 Sebagai lanjutan dari wawancara kemarin, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penutupan dan pembongkaran Lokalisasi?

KN :

**Saya selaku Kepala Desa prihatin dengan kondisi warga saya terlebih-lebih setelah pembongkaran ini, setelah penutupan saja dampak dari segi ekonomi sangat miris sekali, untuk makan saja susah, apalagi setelah pembongkaran ini, warga saya tambah sangat berat merasakan dampak yang di timbulkan, selain hilangnya mata pencaharian, mereka juga kehilangan tempat tinggal yang sudah bertahun-tahun mereka tinggali dan beranak pinak di sana. Saya sekarang di tekan dari bawah yaitu warganya saya dan ditekan dari atas juga yaitu atasannya sehingga saya juga serba salah untuk bertindak sekarang.**

- 2 Berapakah jumlah warga bapak yang terkena dampak dari penutupan dan pembongkaran ini?

KN :

**Data yang dihimpun oleh Pemerintah Desa saat ini berjumlah 39 KK dari 2 RT dan 1 RW, 10 KK luar Ponorogo dan sisanya warga Ponorogo, itupun sudah termasuk warung-warung yang di luar kompleks Lokalisasi, padahal warung-warung yang di luar itu tidak termasuk tanah desa dan tidak melakukan prostitusi.**

- 3 Bagaimana nasib mereka yang tidak memiliki tempat tinggal? untuk Ibu Jumini sendiri, bagaimana keadaan ibu setelah warung ibu dibongkar? bagaimana untuk penghasilan ibu sendiri?

KN :

**Untuk yang 20 KK dari Ponorogo sudah memiliki tempat tinggal walaupun sementara, ada dari mereka yang tinggal bersama saudara mereka. Tapi kita tau sendiri yang namanya numpang pasti tidak nyaman tinggal di rumah sendiri. Sedangkan yang parah itu untuk yang 9 KK belum punya tempat tinggal, sampai saat ini belum jelas nasib mereka dan masih jadi pertanyaan. Dari pemerintahan sendiri hanya di suruh menunggu kebijakan selanjutnya terkait akan hal ini.**

- 4 Untuk warung-warung yang menurut bapak bukan berdiri di atas tanah desa dan tanah pribadi, bagaimana warung itu bisa di bongkar juga? Berapa jumlah warung yang dibongkar tersebut? Apa alasan pemerintah membongkar warung-warung tersebut?

KN :

**Warung-warung tersebut berjumlah 24 warung yang dimiliki oleh 21 orang secara pribadi dan di atas milik sendiri, alasan pemerintah membongkar warung tersebut karena dibangun di atas bahu jalan dan sebelumnya juga warung-warung tersebut sudah ikut mendapat dana kompensasi dari pemerintah.**

- 5 Apakah ada dana kompensasi untuk pembongkaran bangunan warga bapak?

KN :

**Tidak ada dana kompensasi karena sebelumnya sudah menerima, pembongkaran ini hanya berupa himbauan untuk meninggalkan Lokalisasi dan dengan waktu yang tidak lama langsung dibongkar tanpa ada yang tersisa.**

Wawancara Dengan Nama/kode : Bapak Bejo Utomo / K.B

Tgl/bulan : 21 Januari 2016

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

1. Bagaimana pendapat bapak dengan penutupan lokalisasi ini?

K.B :

**Saya selaku sesepuh mewakili yang lain dirugikan sekali dengan adanya agenda ini terutama dari segi ekonomi karena penghasilan tidak ada, biasanya hanya jualan kopi di karenakan SDM rendah dan modal yang tidak cukup apabila mau buka usaha.**

2. Bagaimana proses penutupan lokalisasi ini?

K.B :

**Berjalan dengan aman dan tertib dan tidak ada konflik karena warga sini**

3. Bagaimana dengan dana kompensasi yang telah diberikan oleh Dinas Pemprov?

K.B :

- **Dana Kompensasi yang diberikan :**
  - **WTS sebanyak 167 orang = Rp. 5.500.000/org**
  - **Mucikari sebanyak 39 orang = Rp. 4.500.000/org**
  - **Yang terdampak mulai dari tukang parkir, tukang laundry, tukang sampah dan lain sebagainya sebanyak 114 orang = Rp. 4.000.000/org.**
- **Selain bantuan dari Kementerian Sosial, bagi para WTS mendapat tambahan bantuan dana kompensasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan untuk para Mucikari sebanyak 38 orang masing-masing mendapat bantuan modal ekonomi produktif dari pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).**
- **Dana yang didapatkan belum sepenuhnya membantu, hanya untuk dibuka warung kopi kecil-kecilan karena keahlian cuma itu.**

4. Bagaimana dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan khususnya oleh warga lokalisasi baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung?

K.B :

**Sangat berdampak pada ekonomi, seperti ada yang menggadaikan apa yang mereka miliki untuk bertahan hidup, kerja jadi serabutan dan tidak menentu.**

5. Apakah ada langkah konkrit dari pemerintah Desa dan Dinas terkait untuk membantu warganya?

K.B :

**Sampai saat ini belum ada langkah kongkrit dari selesainya penutupan kemarin, hanya sebatas pemantauan dari pihak keamanan.**

6. Apa harapan Bapak sebagai perwakilan untuk mereka yang terkena dampak dari agenda ini?

K.B :

**Harapannya kejelasan akan hal ini, jika benar-benar ditutup, berikanlah jaminan dan ganti rugi yang layak bagi warga lokalisisi khususnya dari segi ekonomi termasuk meningkatkan kesiapan SDM warga sekitar untuk menghadapi dampak dari penutupan ini, karena ini menyangkut kelangsungan hidup ke depannya, bukan dengan hanya sebatas memberi bekal yang hanya prinsipial dalam rangka memenuhi syarat-syarat dalam agenda penutupan.**

Wawancara Dengan Nama/kode : Bapak AKP Denny / KP

Tgl/bulan : 21 Januari 2016

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

1. Apa dan Bagaimana peran aparat keamanan baik dalam proses penutupan maupun pasca penutupan?

K.P :

**Aparat keamanan di sini berperan sebelum dan sesudah penutupan bertugas menjaga kamanan dan ketertiban karena ini termasuk penyakit masyarakat dan butuh pengawasan, salah satunya pengawasan tersebut dengan terus menerus secara rutin melakukan monitoring secara dadakan ke tempat Lokalisasi agar kami bisa mengetahui apakah penutupan ini secara fakta sesuai dengan agenda.**

2. Bagaimana tingkat perbandingan kriminalitas sebelum dan sesudah penutupan?

K.P :

**Perbandingan sebelum dan sesudah penutupan tidak terlalu berbeda jauh, yang turun hanya tingkat keramaian di tempat Lokalisasi. Sebenarnya sebelum penutupan juga pada faktanya angka kriminilatas untuk wilayah Ponorogo pada umumnya menurun di karenakan salah satunya batas jam aktivitas malam di kurangi hanya sampai jam 24.00 dan peredaran minuman keras dibatasi.**

3. Bagaimana kondisi Lokalisasi setelah penutupan?

K.P :

**Kondisi Lokalisasi menjadi sepi karena secara resmi sudah ditutup dan tidak adanya pengunjung.**

4. Apa saja program yang dilaksanakan oleh aparat keamanan terkait dengan agenda ini?

K.P :

- **Program untuk saat ini bekerja sama dengan pihak keamanan dan pihak yang terkait lainnya seperti BABINSA, SATPOL PP dan Kecamatan melakukan pemantauan terus-menerus pasca penutupan dan ini juga tertuang dalam MUSPIKA.**
  - **Melakukan penyuluhan ataupun bimbingan kepada Eks WTS dan warga sekitar dalam rangka antisipasi pasca penutupan**
5. Bagaimana pendapat Bapak selaku aparat keamanan dengan agenda penutupan ini? bagaimana dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi dan sosial

K.P:

menurut saya dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan dari agenda ini belum mampu secara maksimal ditanggulangi oleh pemerintah daerah, baik itu dari segi ekonomi dengan hilangnya mata pencaharian tetap dan belum ada penggantinya dan dampak negatif sosialnya yaitu prostitusi ilegal sedikitnya banyaknya masih berjalan di lingkungan sekitar dan menjamur diluar lingkungan lokalisasi yang mana nantinya prostitusi ini akan bergeser tingkah lakunya, yang tadinya hanya melakukan prostitusi di tempat dan itu masih terkontrol oleh pihak yang terkait, bergeser menjadi prostitusi dengan sistem panggilan yang berlabelkan atau notabe transaksinya semacam warung kopi atau remang-remang yang sudah menjamur di kawasan Ponorogo seperti yang ada di jalan baru, kecamatan siman, daerah Keyang dan Balong dan lain sebagainya. Hal semacam ini susah untuk dikontrol dan belum ada peraturan ataupun undang-undang yang mengaturnya.

Wawancara Dengan Nama/kode : Bapak Khoirurrosyidin/KH (dari sisi Good Governance) dan Bapak Yusuf Harsono/YH (dari sisi Pengamat Sosial).

Tgl/bulan : 4 dan 11 Juni 2016

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

- 1 Secara umum, dalam kasus ini banyak pertentangan antara pembuat dan pelaksana kebijakan dengan mereka yang terkena dampak dari kebijakan ini, bagaimanakah seharusnya kebijakan itu tersebut menurut teori Good Governance?

KH :

Berbicara masalah ini sebenarnya terkait dengan implementasi kebijakan, sedangkan Instruksi ini berasal dari Gubernur JATIM yang artinya secara otomatis seluruh daerah JATIM harus mengikuti kebijakan tersebut. Terkait adanya pertentangan antara pro dan kontra dalam kebijakan itu sudah pasti ada dan ini resikonya.

Pemerintah dalam hal ini keadaannya sulit dan dilematis, di satu sisi harus bisa mengayomi warganya dan di sisi lain harus menegakkan aturan yang ada. Pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja dalam hal ini, pemerintah harus punya alternatif solusi pemecahan masalah agar warganya tidak terlalu begitu di korbankan atau kehilangan pekerjaannya dan bisa bertahan hidup dengan tidak mengulangi pekerjaan lamanya dan saya rasa itu bisa dilakukan.

YH :

Permasalahan ini terutama sehabis penutupan akan muncul semacam teori DOMINO yaitu Door to Door, prakteknya banyak ditemukan di lingkungan masyarakat kita karena menjamur, mudah dijangkau dan tidak dilokalisir dan penyebaran penyakit seperti AIDS semakin tinggi. Dari sedikit pandangan di atas, pemerintah daerah harus menanggulangi efek sosial (menjamur prostitusi) maupun ekonomi (mata pencaharian hilang) yang sangat luas dari kebijakan itu, bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan

Untuk mengatasi efek di atas, pemerintah daerah ataupun dinas harus mencegah hal itu terjadi.

- 2 Aktor dalam suatu Good Governance yaitu Negara, Masyarakat dan Swasta, bagaimana peran dan posisi masing-masing aktor tersebut?

KH :

Dalam kasus ini, konsep Good Governance hanya bersinggungan antara Negara dan masyarakat, sedangkan posisi Negara dalam kondisi yang dilematis, mau dilegalkan tetapi ini bisnis haram tetapi jika tidak dilegalkan akan menimbulkan kekacauan karena bisnis ini identik dengan kekerasan, minuman keras dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah harus tegas mengatur hal ini, karena pemerintah punya peran besar dalam hal ini ketimbang aktor yang lain.

- 3 Berorientasi pada pencapaian tujuan bersama, apakah kebijakan ini termasuk dalam tata pemerintahan yang baik mengingat ada sebagian masyarakat yang dikorbankan(hilangnya mata pencaharian) dan ancaman menjamurnya prostitusi illegal di luar yang tidak bisa di kontrol?apakah ini pertanda bertambah atau berkurangnya angka kriminal dan apakah bisa mengentaskan angka kemiskinan dari kacamata Bapak?bagaimana dengan

kebijakan pemerintah yang hanya sebatas pemberitahuan dan pemulangan tanpa ada tindak lanjut dan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dinas sosial setempat, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali ke pekerjaan lamanya?

KH :

**Dalam hal ini perlu survey yang lebih mendalam lagi, tidak bisa hanya berdasar pada analisis bahwa prostitusi menjamur di mana-mana.**

**Dalam hal kemiskinan atau mata pencaharian mereka yang hilang akibat kebijakan, kasus ini secara umum sudah dipikirkan karena ini kebijakan dari atas untuk seluruh wilayah Jawa Timur, hanya saja yang jadi masalah sekarang semuanya itu belum terjangkau dalam mengentaskan kemiskinan.**

**Untuk masalah kebijakan pemulangan yang hanya sebatas itu, hal ini seharusnya lebih komprehensif tidak bisa hanya memulangkan dan urusan menjadi selesai karena mereka ini ibaratnya terkena penyakit yang harus disembuhkan dengan proses yang mungkin lama.**

**Ideal Good Governance sebenarnya pemerintah harus secara sadar membela warganya, memfasilitasi warganya dan pastinya harus menjamin kelangsungan hidup mereka ke depan. Tapi ideal semacam ini tidak mudah untuk diimplementasikan.**

YH :

**Memang secara analisa diperlukan kembali apakah terjadi dampak semacam itu atau tidak, tapi efek semacam itu secara ekonomi, sosial dan bahkan secara kesehatan otomatis kemungkinan besar terjadi.**

**Kebijakan ini tidak bisa dikatakan tujuan bersama juga, karena mengingat ada yang dikorbankan, bisa saja ada kemungkinan kepentingan politik di dalamnya seperti Gubernur mengeluarkan kebijakan ini karena disukai oleh beberapa kelompok kepentingan dan akan menjadi sejarah bagi pemerintahannya.**

- 4 Apakah Bapak setuju dengan perkataan Bapak Sudiono selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Tuna Wisma Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo bahwa dalam kebijakan itu pasti ada yang dikorbankan?bagaimana meminimalisir mereka yang merasa dikorbankan?

KH :

Semua kebijakan pasti ada yang dikorbankan dan ini wajar karena pasti ada dua sisi antara pro dan kontra dalam kebijakan, dan dalam kasus ini merupakan sebuah resiko profesi.

Pemerintah harus mengubah paradigma pemikiran mereka yang merasa dikorbankan, penyebab mereka begitu karena pekerjaan mereka telah di tutup dan mereka tidak bisa bekerja.

YH :

Tidak boleh ada kebijakan yang mengorbankan sebagian kelompok masyarakat, makanya kajian semacam ini harus komprehensif.

Permasalahannya adalah Lokalisasi ini bergeser fungsinya yang tadinya bertujuan dijadikan tempat pembinaan, pemberdayaan dalam rangka pengentasan dunia hitam dalam hal agar tidak menyebarnya penyakit masyarakat ini dan apabila di Institusikan oleh pemerintah bisa dikendalikan, tapi pada prakteknya dijadikan proyek oleh sebagian pihak dan dan dijadikan sumber pendapatan, dan ini semakin lama menjadi jauh dari awal tujuan tersebut dan menjadi kesalahan mendasar dalam hal ini karena pemberdayaan tidak sejalan tujuannya dengan mencari pendapatan.

Dalam hal ini, kesalahan pemerintah tidak mau tahu keadaan tersebut dan membiarkan praktek itu terjadi misalnya membiarkan para mucikari menjadikan para PSK sebagai sumber pendapatannya dengan berbagai cara seperti membebani para PSK utang supaya mereka tidak lepas dari mucikari dan akhirnya para PSK berusaha melariskan dirinya demi melunasi utang-utangnya dan hampir bisa dipastikan mereka tidak bisa lepas dari jeratan utang tersebut.

Untuk itu yang harus di tindak adalah bukan sepenuhnya Lokalisasi di tutup, tapi mereka atau oknum yang diuntungkan pada saat Lokalisasi berlangsung karena merekalah yang membentuk dan mempertahankan PSK tersebut dan akhirnya mereka terasa sangat dikorbankan, bisa saja oknumnya itu mucikari, preman di sana, dari pemerintah desa dengan masuknya pendapatan kas desa, atau bahkan bisa saja oknum dari dinas sendiri yang mendapat keuntungan dengan dulunya melegalkan prostitusi.

- 5 Berkaitan dengan dampak yang di timbulkan dari kebijakan ini, salah satunya ancaman menjamurnya prostitusi dan Bapak Sudiono mengatakan ini sudah menjadi ranah ketertiban bukan ranah sosial lagi, dan ini seakan-akan dinas sosial lempar tanggung jawab pekerjaan kepada ranah ketertiban dan beralasan ini merupakan resiko sistem yang ada, bagaimana menurut Bapak dari kaca mata Good Governance?

KH :

Selama tupoksi dijalankan sesuai prosedur, maka itu sudah lebih dari cukup, hanya perlu dievaluasi kembali. Kemudian masalah kebijakan itu berhasil atau tidak serta para PSK kembali ke pekerjaan lamanya, itu bukan semata-mata karena kesalahan dari dinas melainkan karena perilaku mereka yang sudah membudaya dan sulit untuk dihilangkan sampai kapanpun juga.

- 6 Dari segi keefektifitan, apakah kebijakan penutupan ini banyak berdampak positif atau malah sebaliknya bagi masyarakat luas?

KH :

Dari sisi positifnya ada, dengan penutupan ini maka Ponorogo yang terkenal dengan kota santri akan lebih keliatan religiusnya. Kemudian dari sisi negatifnya mereka ada yang buka praktek itu dengan kemasam yang berbeda lagi, tapi jika hal ini selama masih dalam pantauan maka tidak perlu dikhawatirkan.

YH :

Lebih banyak berdampak negatifnya karena banyak yang jadi korban dan dampak sosial ekonominya yang saya sebutkan sebelumnya, walaupun dampaknya itu perlu penelitian kembali, tetapi hipotesis kuat mengatakan hal itu sangat mungkin terjadi.

Masalah julukan kota santri memang benar Ponorogo harus bersih dari itu, tapi jangan disalahkan jika ada prostitusi di sekitar pondok karena dampak menjamurnya prostitusi ini.

- 7 Bagaimana evaluasi kinerja dinas secara keseluruhan di mulai dari :
- I. Perumusan Kebijakan
  - II. Perencanaan Perumusan Kebijakan
  - III. Penyusunan Programnya
  - IV. Penganggaran
  - V. Implementasi Kebijakannya,
  - VI. Evaluasi Kinerja
  - VII. Umpan Balik (Feedback)

KH :

Perumusan ini bersifat top down, jadi hanya menerima satu paket perintah yaitu dalam kasus ini Instruksi Gubernur. Seharusnya dalam hal ini, idealnya dinas sosial juga dilibatkan karena setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda dan penanganan juga berbeda. Masalah pemerintah desa tidak dilibatkan ini hanya dari segi keefektifitan karena mereka termasuk sebagai obyek kebijakan dan alasan pemerintah desa juga tidak dilibatkan karena ada hal-hal yang tidak harus diselesaikan secara pendekatan sosial melainkan melalui pendekatan legalitas berupa Instukrasi penutupan. Seandainya

jika dilakukan dengan pendekatan sosial atau kemanusiaan, penutupan ini tidak akan pernah terjadi dan pasti akan meluas ke masalah lainnya seperti hilangnya pendapatan orang banyak termasuk contohnya masuknya uang untuk pengajian desa setempat karena mungkin saja pengajian itu dibiayai oleh dana Lokalisasi kemarin dan sangat tidak etis sekali pengajian dibiayai dari uang Lokalisasi.

Masalah anggaran cukup atau tidak cukup untuk mereka, saya rasa seberapa besarpun uang yang diberikan, mereka pasti tidak akan pernah puas karena mereka tidak bertindak produktif melainkan sebaliknya yang disebabkan sifat mereka yang Hedonis.

Implementasi kebijakannya ini saya setuju ya karena gejala pertentangannya hanya sesaat dan dampak sosial yang tidak begitu berdampak pada mental generasi kita, masalah mereka jadi korban kebijakan, saya rasa mereka itu justru diselamatkan oleh pemerintah dengan mereka dikasih santunan, pembekelan, fasilitas dan sebagainya.

Evaluasi kinerja keseluruhan dinas harus tetap memantau dengan mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada karena akan menjadi ancaman bagi kita jika mereka kembali beroperasi lagi dan akan kelihatan feedback masyarakat kita di sini dengan aktif atau tidaknya memantau situasi ini.

YH :

Perumusan sampai kepada implementasi kebijakan tidak menutup kemungkinan setiap pemerintah daerah melakukan kreasi dan inovasi untuk menangani masalah ini di masing-masing daerah karena perbedaan karakter masyarakatnya dan ini bisa dijadikan sebagai masukan untuk pemerintah provinsi untuk melakukan dan mengeluarkan kebijakan baru dalam menghadapi efek dari penutupan Lokalisasi di Jawa Timur.

Terkait dengan pendekatan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan asas legalitas memang benar, tapi pemerintah tidak boleh mengenyampingkan asas lainnya seperti asas sosial ekonomi karena ini sebagai dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Masalah implementasi kebijakan harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pada saat pelaksanaannya ini ada beberapa permasalahan misalnya hak lahan, pemerintah menganggap bahwa itu semuanya lahan pemerintah tapi di lain pihak ada sebagian

masyarakat yang menganggap bahwa ada hak lahan pribadi dan bangunannya ikut di bongkar juga. Zaman sekarang tidak selalu pemerintah benar, ada beberapa kasus yang dibuktikan di pengadilan bahwa masyarakat yang benar.

Feedback masyarakat pada umumnya setuju, tapi di sisi lain ada efek atau dampak buruk terjadi yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah dan ini hanya bisa dipahami secara akademik, maka dari itu sering kali pemerintah harus melibatkan kalangan akademisi dalam penyelesaian masalah atau dalam mengeluarkan suatu kebijakan tertentu dan di sisi lain supaya dapat memilih kemungkinan dampak yang tidak terlalu buruk bagi masyarakat dalam suatu kebijakan misalnya kebijakan ini.

Secara keseluruhan pemerintah kurang memahami masalah Lokalisasi dari berbagai perspektif ekonomi, sosiologi, serta kesehatan sehingga kebijakannya banyak menimbulkan banyak Multiplayer efek yang negatif.

